



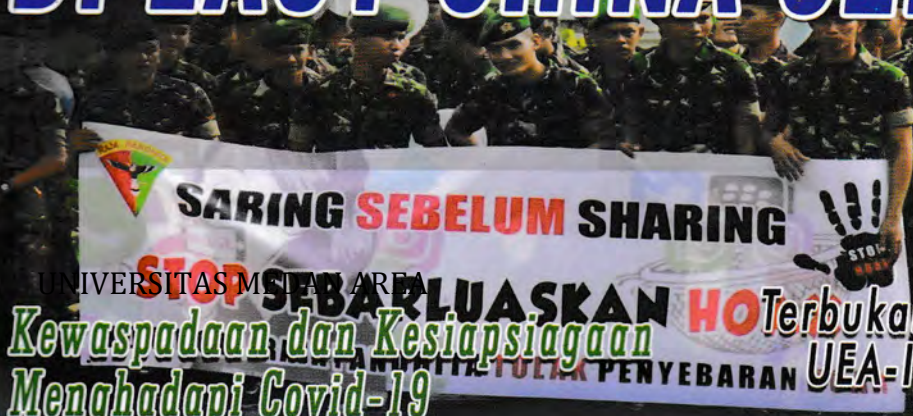
DENIPENI

MAJALAH PROFESIONAL INTELPAM



CERMAT BERMEDIA SOSIAL
Jangan Mudah Percaya Berita Hoax

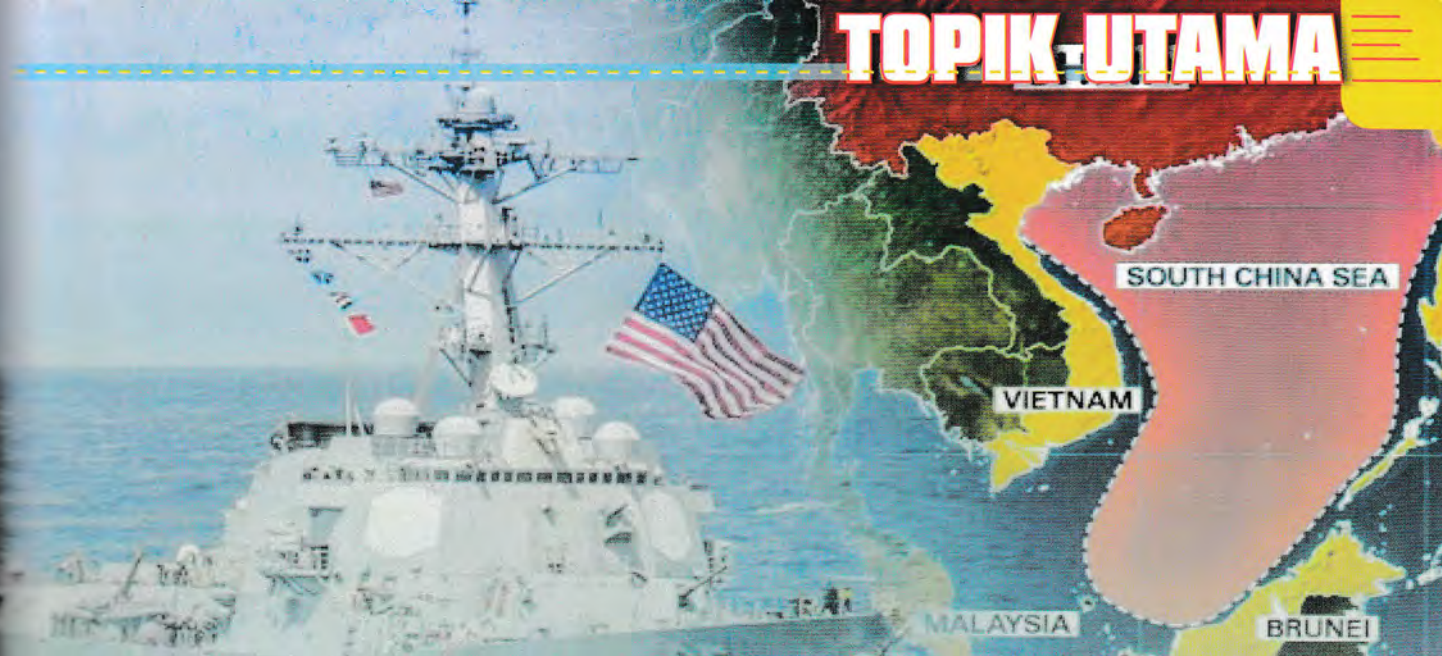
POTENSI PERANG REGIONAL DI LAUT CHINA SELATAN



UNIVERSITAS MERU AREA

Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Covid-19

Terbukanya hubungan Diplomatik UEA-ISRAEL dan dampaknya bagi Indonesia



POTENSI PERANG REGIONAL Di Laut China Selatan

Perdamaian merupakan suatu yang hal yang diinginkan oleh setiap bangsa, dengan terwujudnya perdamaian di suatu kawasan maka setiap negara di kawasan tersebut akan dapat meningkatkan ekonomi melalui perdagangan dan juga kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut akan semakin terjamin. Sekarang ini, hampir tidak ada di dunia yang menginginkan perang, akan tetapi perdamaian tidak dapat diwujudkan hanya dengan semangat atau keinginan untuk hidup damai, melainkan juga haruslah dengan berbagai persiapan dibidang diplomasi dan militer. Seperti yang dikatakan dalam adagium Latin yang berbunyi “*Si Vis Pacem Para Bellum*” yang artinya “apabila ingin hidup dalam perdamaian, maka bersiaplah untuk perang”.

Di era modern, perang tidak hanya melibatkan elemen-elemen angkatan bersenjata sebagai kombatant, melainkan juga melibatkan elemen-elemen lain di tiap-tiap negara yang sedang berperang. Hal ini terjadi dikarenakan konsep “Perang Total” (*Total War/Totale Krieg/Absoluter Krieg/Perang Rakyat Semesta*) yang dicanangkan oleh Jenderal veteran “Perang Napoleon” Carl

Von Clausewitz dan di populerkan melalui catatan harian Jenderal *Erich Ludendorff*, dan kemudian diimplementasikan secara efektif oleh Jenderal *Curtis LeMay* selama perang dunia kedua khususnya pada teater pasifik, dimana Jenderal *LeMay* memerintahkan pesawat pengebom-pengebom strategis Amerika untuk memuat bom-bom yang bersifat *incendiary* (senjata yang dapat menyebabkan terjadinya kobaran api untuk radius yang luas dan dapat bertahan dalam waktu yang lama) dan melakukan pengeboman udara dari jarak dekat terhadap bangunan-bangunan sipil di Jepang selama periode akhir perang dunia kedua. Konsep



perang total dapat mengabaikan hukum-hukum perang dan melakukan penyerangan terhadap segala elemen negara lawan (non kombatan) dengan tujuan untuk melemahkan negara tersebut baik secara ekonomi, politik dan juga psikologis. Semua sumber daya yang dimiliki oleh musuh haruslah dihancurkan demi mendapatkan kemenangan dengan cepat dan mengurangi kerugian dari pihak negara penyerang.

Jenderal Besar A.H. Nasution dalam buku Pokok-Pokok Gerilya mengatakan: "Usaha perang bukanlah cuma usaha angkatan perang saja, melainkan telah menjadi usaha rakyat semesta di berbagai sektor kehidupannya, yang masing-masing ikut serta dalam usaha yang seluruhnya, yang tak dapat lalai melalaikan lagi. Maka si penyerang mengadakan perang kilat untuk memecah organisasi lawan, sebelum ia (lawan) mampu mengerahkan segenap tenaga dan harta rakyatnya buat pertahanan yang semesta. Maka negara-negara yang melakukan persiapan-persiapan perangnya adalah yang menjadi mangsa perang yang demikian, sehingga terlambat membangkitkan pertahanan rakyat semestanya. Ini adalah suatu bahaya bagi negara-negara demokrasi yang dengan sendirinya lazim menjadi yang terserang sehingga ia ketinggalan waktu dalam pengerahan pertahanannya. Menyimpulkan bahwa perang yang sekarang bukan lagi perang antara tentara dengan tentara saja, bukan lagi cuma perang militer, melainkan sekarang yang berperang adalah rakyat, rakyat seluruhnya. Maka itu ilmu perang itu bukan lagi cuma ilmu perang yang khusus dengan strategi, taktik dan logistiknya, melainkan mengenai pula politik militer, politik, psikologi dan ekonomi. Medan perang bukan lagi cuma militer, melainkan juga sepenuhnya politik dan ekonomi". (A.H. Nasution).

Dalam dua tahun terakhir ini sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sekarang ini, telah

terjadi ketegangan di kawasan Asia tenggara, tensi ketegangan yang tinggi diawali oleh persengketaan atas kepulauan Spratly yang di klaim oleh 7 negara. Republik Rakyat China mengklaim keseluruhan kepulauan Spratly dan menguasai 7 pulau; Republik China (Taiwan) mengklaim keseluruhan kepulauan Spratly dan menguasai 1 pulau; Vietnam mengklaim keseluruhan kepulauan Spratly dan menguasai 9 pulau; Malaysia mengklaim 12 pulau dan menguasai 5 pulau; Filipina mengklaim 27 pulau dan menguasai 8 pulau; Brunai Darussalam mengklaim 3 pulau yang paling dekat dengan wilayah negaranya akan tetapi sampai sekarang masih tidak menguasai pulau tertentu; dan Indonesia mengklaim sebagian wilayah perairan Kepulauan *Spratly* sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kemudian pada tahun 2019, Republik Rakyat China mulai melakukan tindakan yang agresif dengan mengklaim hampir



keseluruhan Laut China Selatan melalui konsep *Nine Dash Line*.

Nine Dash Line adalah sembilan titik imajiner yang menjadi dasar bagi Republik Rakyat China, dengan dasar historis, untuk mengklaim wilayah Laut China Selatan. Titik-titik ini dibuat secara sepihak oleh Republik Rakyat China tanpa melalui konvensi hukum laut internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations Convention on the Law of the*

Sea 1982 (UNCLOS 1982) di mana Republik Rakyat China tercatat sebagai negara yang ikut menandatangani. Menurut UNCLOS 1982 suatu negara memiliki kedaulatan atas perairan yang membentang 12 mil laut dari wilayahnya dan kontrol eksklusif atas kegiatan ekonomi yang berjarak 200 mil laut yang disebut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif. Namun Republik Rakyat China berpendapat bahwa *Nine Dash Line* muncul dalam tatanan dunia baru setelah Perang Dunia Kedua dan muncul jauh sebelum UNCLOS 1982. *Nine Dash Line* awalnya muncul di peta China sebagai *Eleven Dash Line* pada tahun 1947. Kala itu, angkatan laut Republik Rakyat China menguasai beberapa pulau di Laut China Selatan yang telah diduduki oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua. Setelah Republik Rakyat China yang merupakan negara komunis didirikan pada tahun 1949 dan pasukan Kuomintang yang merupakan sisa-sisa Republik China melarikan diri ke Taiwan, pemerintah komunis menyatakan dirinya sebagai satu-satunya perwakilan sah China dan mewarisi semua klaim maritim di wilayah tersebut. Pada tahun 1950, dua garis dari *Eleven Dash Line* dihapus dan menjadi *Nine Dash Line* untuk mengeluarkan Teluk Tonkin yang berada di wilayah Vietnam Utara sebagai hadiah untuk partai komunis Vietnam Utara pada saat itu. Keberadaan *Nine Dash Line* menyebabkan keributan dan kegaduhan dengan negara-negara lain di sekitar Laut China Selatan. Berdasarkan

peta Laut China Selatan yang dikeluarkan Republik Rakyat China, wilayah *Nine Dash Line* membentang dari Kepulauan Paracel hingga laut di Kepulauan Spratly.

Ambisi Republik Rakyat China untuk membangun suatu hegemoni yang menjadi kekuatan baru di dunia untuk melawan pengaruh Amerika Serikat yang kerap dianggap sebagai polisi dunia telah menimbulkan arogansi Republik Rakyat China terhadap negara-negara tetangganya khususnya di wilayah Laut China Selatan. Ambisi Republik Rakyat China tersebut dimulai dengan kebijakan pemerintah Republik Rakyat China untuk membangun suatu jalur perdagangan yang berpusat di Republik Rakyat China, jalur perdagangan tersebut diharapkan akan menjadi jalur sutera modern yang akan membawa Republik Rakyat China sebagai pemimpin ekonomi dunia, kebijakan tersebut dikenal dengan *One Belt One Road* atau Proyek OBOR yang memberikan dana pinjaman kepada negara-negara berkembang di kawasan jalur sutera baru untuk membangun infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara, akan tetapi pinjaman tersebut telah menjadi jebakan hutang bagi negara-negara berkembang yang mendapatkan pinjaman, negara-negara itu harus mengembalikan pinjaman beserta bunganya dalam kurun waktu yang relatif singkat dengan sanksi apabila negara peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman beserta bunganya dalam waktu yang telah dijanjikan, maka negara peminjam harus menyerahkan hak penggunaan dan pengelolaan fasilitas infrastruktur yang di bangun menggunakan dana pinjaman kepada pemerintah Republik Rakyat China selama lima puluh tahun.

Republik Rakyat China juga semakin menekan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara yang berada di sekitar Laut China Selatan. Kapal-kapal patroli Republik Rakyat China kerap melakukan pelanggaran kedaulatan dengan memasuki wilayah-wilayah negara tetangganya, hal ini terjadi salah satunya terjadi di wilayah perairan Natuna dan menyebabkan kemarahan Bangsa Indonesia. Kapal-kapal nelayan Republik Rakyat China melakukan



UNIVERSITAS MEDAN AREA

pencurian ikan di wilayah negara-negara tetangganya di Asia Tenggara dengan dikawal oleh kapal patroli Republik Rakyat China. Pemerintah Republik Rakyat China juga membangun pulau buatan atau pulau reklamasi di Laut China Selatan, yang belakangan ini diketahui bahwa pulau buatan tersebut telah dijadikan atau akan dijadikan pangkalan militer Tentara Pembebasan Rakyat (Tentara Republik Rakyat China). Buah dari arogansi Republik Rakyat China tersebut telah menjadikan beberapa negara tetangganya meminta bantuan kepada Amerika Serikat untuk membantu menyelesaikan sengketa Laut China Selatan. Amerika sebagai polisi dunia menunjukkan komitmennya dengan menentang semua klaim Republik Rakyat China di Laut China Selatan. Amerika mengirim Armada Kapal Induknya untuk berjaga di Laut China Selatan dan menekankan agar pemerintah Republik Rakyat China untuk menghentikan segala aktifitasnya di Laut China Selatan; mengakui kedaulatan Republik China (Taiwan) sebagai negara berdaulat dan membuka wacana kemerdekaan Hongkong. Amerika Serikat juga menegaskan bahwa mereka akan melindungi kepentingan internasional di Laut China Selatan dan bahkan bila diperlukan mereka siap untuk melindungi kepentingan internasional tersebut dengan jalan kekerasan (konflik bersenjata). Pernyataan Amerika Serikat tersebut di dukung oleh negara-negara Asia Tenggara dan juga negara-negara sekutu Amerika Serikat seperti Jepang, India, Inggris, Australia, Perancis dan lain-lain.



Sebagai mana dikutip dari CNBC Indonesia, media corong Partai Komunis China *The Global Times* menulis editorial khusus menanggapi hubungan panas Republik Rakyat China dengan Amerika Serikat dan sejumlah negara Asia Tenggara terkait Laut China Selatan. Bahkan dalam artikel yang di publikasi pemerintah Republik Rakyat China tersebut dikatakan bahwa Republik Rakyat China memiliki keberanian nyata untuk terlibat dalam perang, guna melindungi kepentingan inti negara itu dan siap menanggung segala akibatnya. Media itu menuding sejumlah negara tetangganya dengan dukungan Amerika Serikat, mencoba memperlakukan Republik Rakyat China dengan kejam. Apalagi Republik Rakyat China, tulis editorial itu, adalah kekuatan ideologis yang ditolak Amerika Serikat dan Barat. Pemimpin media *The Global Times*, *Hu Xijin* mengatakan: "Mereka (Amerika Serikat dan Sekutunya) percaya bahwa China, di bawah tekanan strategis Amerika Serikat, takut, tidak mau, atau tidak dapat terlibat dalam konflik militer dengan mereka. Kami yakin bisa menang di medan perang jika konflik terjadi dengan kekuatan tetangga yang memiliki sengketa teritorial dengan China. Demikian pula, jika ada perang dengan Amerika Serikat di dekat perairan pesisir China, kami juga memiliki peluang bagus untuk menang. Dalam kaitannya dengan konflik eksternal, salah satu masalah besar kita adalah kita berbicara terlalu sedikit



Kapal perusak milik AS berlayar ke Laut China Selatan

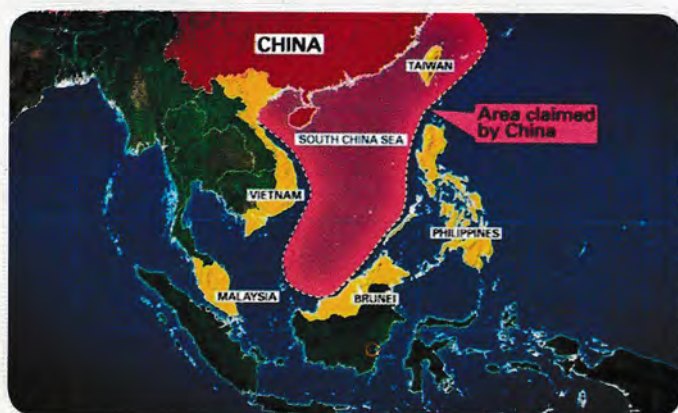


dan terlalu lambat. Pihak lain selalu berbicara lebih banyak dan lebih cepat tentang detail konflik, kita harus berusaha keras untuk memecahkan masalah ini”.

Apabila terjadi perang antara Republik Rakyat China dengan Amerika Serikat dan sekutunya di Laut China Selatan, tentunya akan sangat memberikan pengaruh terhadap negara-negara di Asia khususnya negara-negara di wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Selatan. Dampak tersebut tidak hanya kerusakan yang diakibatkan oleh persenjataan, tetapi juga kerusakan yang diakibatkan oleh masalah ekonomi dan terhentinya jalur perdagangan, dan juga masalah sosial politik lainnya. Walaupun Indonesia tidak terlibat dengan konflik ataupun kampanye militer secara langsung di Laut China Selatan, akan tetapi Indonesia tidak dapat menghindari dampak dari perang tersebut. Sebagai contoh: Apabila terjadi perang di Laut China Selatan, jalur perdagangan kawasan Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia Selatan akan terputus; Kemudian akan terjadi exodus pengungsi korban perang dalam jumlah besar, dimana pengungsi tersebut akan mencari tempat pengungsian yang aman ke wilayah selatan seperti ke Australia, Indonesia dan Selandia Baru; Peperangan akan merusak ekosistem laut termasuk kekayaan bahari Indonesia, kerusakan dan radiasi yang dihasilkan oleh senjata yang digunakan dalam peperangan tersebut akan mencemari lingkungan perairan, meracuni biota laut, merusak terumbu karang, membahayakan pelayaran komersial dikarenakan ranjau laut yang terbawa arus keluar dari zona peperangan sehingga walaupun perang sudah berakhir, Indonesia akan mengalami kerugian; Terjadinya sabotase atau salah sasaran, dalam perang dunia kedua, negara netral kerap juga terkena imbas dari peperangan, seperti misalnya

kapal-kapal dagang Argentina yang terkena serangan U-Boat Jerman selama perang dunia kedua, ataupun sabotase yang dilakukan oleh Uni Soviet kepada orang-orang Asia di Siberia agar mereka membantu Uni Soviet memerangi Jerman.

Indonesia sebagai negara penjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 haruslah dapat berperan aktif sebagai penengah untuk menyelesaikan dan mendamaikan konflik internasional di belahan dunia manapun. Terkait dengan potensi perang di Laut China Selatan, Indonesia harus berupaya agar perang tidak terjadi, hal ini dikarenakan apabila terjadi perang, maka perang tersebut akan membawa kerugian di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia juga akan merasakan imbas dari perang tersebut. Apalagi peperangan yang melibatkan dua kekuatan *top rank* militer dunia yang memiliki persenjataan nuklir seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat China, pastinya akan dengan cepat berubah dari perang regional menjadi perang dengan skala global (perang dunia). Oleh karena itu Indonesia harus mengupayakan untuk menjadi penengah dan membawa para pihak yang terlibat ke meja perundingan.





Dan untuk menjaga apabila mediasi perundingan gagal dan konflik Laut China Selatan berubah menjadi perang skala regional maupun skala global, pemerintah Republik Indonesia haruslah melakukan peningkatan-peningkatan kemampuan tempur modern dari Tentara Nasional Indonesia dan terus melakukan pemuktahiran dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI. Pemerintah harus memasang sistem radar dan sistem pertahanan udara yang canggih serta modern untuk mencegah masuknya serangan yang salah sasaran (peluru kendali nyyasar) ke wilayah Republik Indonesia yang dekat atau berbatasan langsung dengan wilayah peperangan, apalagi perang di Laut Cina Selatan akan melibatkan pesawat-pesawat tempur modern dengan teknologi *Stealth* (siluman tak terdeteksi radar), kapal selam “kelas kilo” yang sangat sulit terdeteksi sonar, rudal-rudal balistik dan rudal-rudal penjelajah modern dengan kecepatan terbang mencapai mach 4 yang sulit untuk ditembak dengan senjata pertahanan udara konvensional, senjata elektronik seperti *Electro Magnetic Pulse* (EMP) yang dapat merusak peralatan elektronik dan lain sebagainya.

Untuk itu pemerintah harus memasang radar-radar baru di wilayah-wilayah yang strategis; Meningkatkan kemampuan sonar kapal-kapal perang permukaan maupun kapal selam TNI-AL; Membeli sistem pertahanan udara anti rudal balistik dan rudal penjelajah yang terintergrasi

dengan satelit sekelas sistem pertahanan S-400 milik Rusia atau sistem pertahanan udara *Aegis Combat System* milik Amerika Serikat; Memasang perangkat pertahanan perang elektronik di Alutsista TNI khususnya di pesawat-pesawat tempur TNI AU; Meningkatkan kemampuan personel TNI khususnya di bidang kontra intelijen, anti sabotase, dan anti terorisme; meningkatkan kemampuan personel intelijen khususnya dalam hal merangkul masyarakat sekitar daerah Laut China Selatan untuk mendapatkan informasi, seperti misalnya yang dilakukan oleh Panglima Angkatan Laut Jepang Laksamana Togo Heihachiro saat pertempuran Tsushima, dimana nelayan-nelayan Jepang secara aktif melaporkan pergerakan dan lokasi kapal-kapal perang Rusia kepada Laksamana Togo sehingga Angkatan Laut Jepang dapat menyusun penyergapan dan menghancurkan Angkatan Laut Rusia. Sebagai mana yang dikatakan Jenderal Besar A.H. Nasution bahwa peperangan di era modern merupakan perang yang melibatkan rakyat semesta, oleh karena itu bangsa Indonesia haruslah memanfaatkan seluruh potensi dan sumber dayanya untuk melindungi kedaulatan negara dan rakyat dari segala bentuk ancaman dan bahaya. Selain kita berupaya untuk mencegah terjadinya perang melalui perundingan untuk mendamaikan negara-negara yang bersengketa di Laut China Selatan, sebagai bangsa yang mandiri dan berdaulat kita juga tidak boleh lupa untuk terus mengasah kekuatan pertahanan kita, sehingga dengan pertahanan yang mumpuni maka negara-negara lain akan segan kepada bangsa Indonesia, kekuatan pertahanan yang baik tentunya akan membantu menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa penjaga perdamaian yang kuat dan bermartabat sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945. □

Oleh : Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH., M.H. (MILAN)
(Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area/
Mantan Anggota BAIIS TNI)